

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi salah satu isu sensitif dan kontroversial yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Revisi ini mengusulkan perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan negara, seperti penanganan terorisme, bencana alam, dan konflik sosial. RUU TNI merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian belakangan ini karena tidak hanya mencakup aspek hukum dan pertahanan negara tetapi juga membahas berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. RUU TNI ini penting untuk diteliti karena menyangkut siapa yang seharusnya memegang kendali utama dalam negara, yaitu pihak sipil, bukan militer. Selain itu, ada kaitannya juga dengan perlindungan hak-hak warga dan arah demokrasi Indonesia ke depan. Salah satu isu yang paling banyak menuai perdebatan publik adalah penempatan personel TNI aktif dalam jabatan-jabatan sipil. Sebagian pihak menilai kebijakan ini diperlukan untuk mempererat kerja sama antara dunia militer dan sipil dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia dapat mengulangi masa lalu kelam, ketika militer terlalu dominan dalam urusan sipil dan politik, sehingga mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang telah dibangun sejak era Reformasi (Quddus & Firdaus, 2025)

RUU TNI menjadi polemik di tengah masyarakat, akademisi, dan pengamat hukum. Selain proses perumusannya yang dinilai kurang terbuka bagi publik, substansi dari RUU TNI juga memunculkan kembali sensitivitas sejarah. Sejumlah pasalnya dianggap sebagai tanda munculnya kembali praktik dwifungsi militer yang sebelumnya telah dihapus pada era reformasi (Putra et al., 2025). Pembahasan RUU TNI memunculkan kembali kekhawatiran publik terkait potensi kembalinya dwifungsi militer dalam kehidupan bernegara. Sejumlah pasal dalam RUU tersebut dinilai berpotensi memperluas kewenangan TNI di luar fungsi pertahanan, terutama terkait penempatan perwira aktif pada jabatan sipil, perluasan tugas operasi militer selain perang (OMSP), serta keterlibatan langsung dalam lembaga pemerintahan. Jika peran militer terus diperluas tanpa pengawasan yang jelas, maka bisa saja kekuasaan disalahgunakan. Akibatnya, nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun sejak reformasi bisa rusak. Perdebatan soal RUU TNI ini bukan hanya soal keamanan negara, tapi juga soal bagaimana kekuasaan dijalankan secara adil dan bertanggung jawab dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan sistem demokrasi. Menurut Abraham Lincoln (1863), secara umum demokrasi berarti pemerintahan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan dilakukan untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem demokrasi, pemerintah bertanggung jawab untuk terlibat dengan rakyat dan mempertimbangkan aspirasi mereka (Aridho et al., 2024). Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang bertumpu pada kehendak rakyat, setiap warga negara memiliki hak untuk berperan aktif dalam

proses pengelolaan dan penetapan kebijakan-kebijakan pemerintahan (Nurrohman et al., 2024).

Pembahasan mengenai revisi undang-undang ini tidak terlepas dari perdebatan yang melibatkan berbagai kepentingan. Tantangan utama datang dari respon masyarakat sipil. Organisasi non-pemerintah, akademisi, aktivis HAM, hingga masyarakat umum menunjukkan keragaman pandangan terhadap RUU TNI ini. Kontroversi itu muncul dikarenakan proses legislasi RUU tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia (HAM). Proses pembahasan dinilai minim transparansi karena dilakukan secara tergesa-gesa selama masa reses DPR, dan dilaksanakan secara tertutup di hotel tanpa adanya pelibatan publik yang memadai (Utami, 2025).

Isu dwifungsi militer yang mencuat dari beberapa pasal dalam RUU TNI menjadi pemicu utama munculnya kritik dan kekhawatiran dari berbagai kelompok masyarakat. Isu ini menjadi penting karena dwifungsi militer memiliki sejarah problematik dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pemisahan tegas antara ranah sipil dan militer telah menjadi prinsip utama reformasi pasca-1998, salah satunya melalui UU TNI No. 34/2004 yang melarang militer aktif menduduki jabatan sipil. Dengan demikian, setiap regulasi yang berpotensi membuka kembali ruang tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap konsolidasi demokrasi dan supremasi sipil.

Masyarakat mengkritik RUU TNI ini karena khawatir wewenang TNI akan diperluas tanpa pengawasan yang ketat, sehingga rentan disalahgunakan dan

bertentangan dengan prinsip demokrasi. RUU ini juga dikhawatirkan mengembalikan peran TNI seperti era Orde Baru, ketika militer berfungsi ganda di bidang pertahanan dan pemerintahan sipil. Revisi Undang-Undang TNI yang memperluas akses prajurit aktif ke jabatan sipil berpotensi menimbulkan risiko serupa di masa lalu, mengingat perbedaan fundamental dalam pelatihan dan orientasi antara institusi militer dan aparat sipil, khususnya dalam penanganan isu-isu kemasyarakatan dan hak asasi manusia (Quddus & Firdaus, 2025).

Dilansir dari website Amnesty International Indonesia, Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa draf revisi UU TNI yang beredar di kalangan publik memuat sejumlah usulan perubahan yang dianggap bermasalah. Salah satu ketakutan terbesar adalah kemungkinan kembalinya praktik dwifungsi seperti pada masa Orde Baru, di mana militer tidak hanya menjalankan tugas pertahanan, tetapi juga terlibat dalam urusan pemerintahan dan kehidupan sipil. Kondisi ini dianggap berisiko bagi sistem demokrasi karena bisa menghilangkan batas antara kekuatan militer dan kekuasaan sipil.

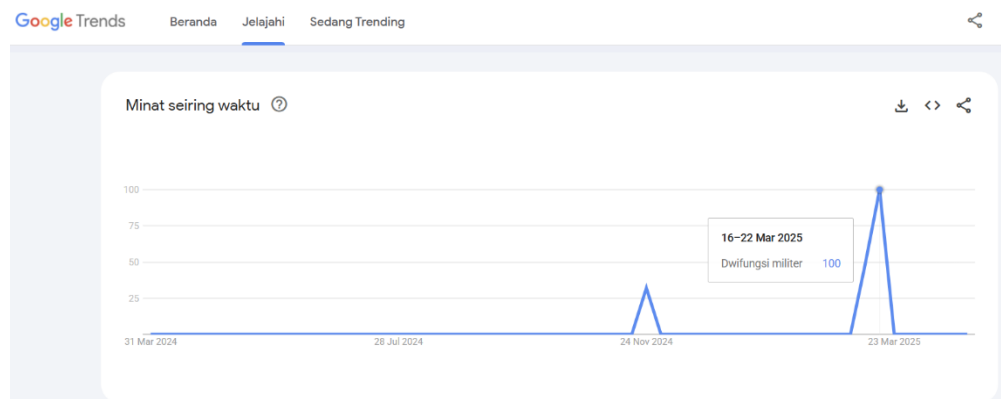
Menanggapi isu dwifungsi militer yang menjadi polemik pada RUU TNI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Pimpinan Komisi I dan perwakilan delapan fraksi menggelar konferensi pers untuk menjelaskan dinamika terbaru mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dasco menjelaskan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI pada Senin, 17 Maret 2025, bahwa terdapat sejumlah draf

RUU TNI yang beredar di publik dan media sosial, namun draf tersebut berbeda dengan yang sedang dibahas di Komisi I DPR. Ia menyampaikan bahwa pihaknya ingin meluruskan hal tersebut kepada publik melalui media, serta menegaskan bahwa terdapat tiga pasal yang saat ini menjadi fokus dalam pembahasan RUU TNI (DPR RI, 2025).

Media massa pun menjadi elemen penting dalam membentuk opini publik, baik dengan menyampaikan fakta-fakta objektif maupun melalui narasi tertentu yang mencerminkan sudut pandang media tersebut. Informasi yang disampaikan media turut memengaruhi bagaimana masyarakat memandang RUU ini, apakah sebagai langkah positif atau sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip kebebasan dan keadilan. Masyarakat memiliki tugas sebagai kontrol dalam politik. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya politik adalah dengan menyuarakan opini publik. Opini publik merupakan sebuah proses ketika warga negara menyampaikan gabungan dari pikiran, perasaan, dan gagasan berupa usulan yang diungkapkan terhadap kebijakan pemerintah (Aridho et al., 2024).

Di tengah perkembangan dunia digital seperti sekarang, media massa juga turut mengalami kemajuan dan semakin beragam. Media massa berperan penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu hangat yang sedang diperbincangkan. Selain itu, media massa berfungsi sebagai saluran komunikasi yang dapat menjangkau banyak orang dan berpotensi memengaruhi diskursus publik (Kurniansyah, 2025). Masuknya era digital atau internet telah mengubah cara media massa menyebarkan

informasi, terutama di Indonesia. Pertumbuhan media *online* mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk dalam menyajikan informasi yang sebelumnya hanya tersedia oleh media konvensional kini disajikan dengan lebih beragam oleh media digital (Wardaningsih, 2021).



Gambar 1. Keyword "Dwifungsi militer" pada Google Trends

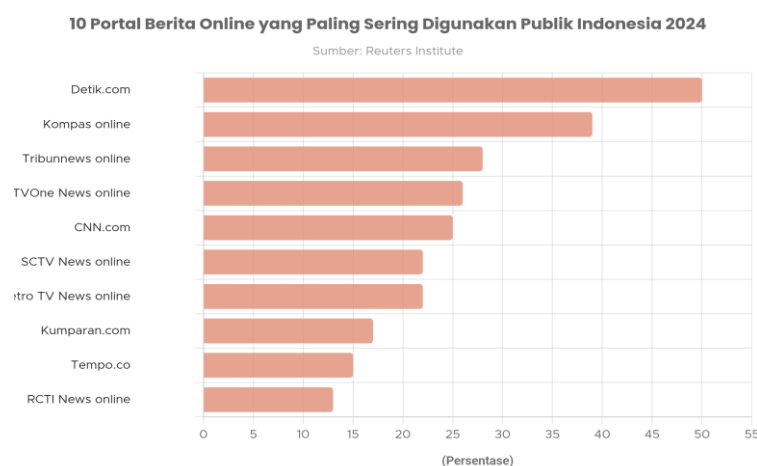
Berdasarkan data *Google Trends* dalam rentang 12 bulan terakhir (April 2024–Maret 2025), topik yang berkaitan dengan RUU TNI, seperti “Dwifungsi Militer” menjadi topik yang cukup banyak dicari oleh masyarakat di mesin pencarian Google. Dari grafik pencarian, isu kontradiksi ini mencapai puncaknya pada tanggal 16 Maret – 22 Maret 2025, bertepatan dengan munculnya polemik terkait pembahasan RUU TNI yang dianggap membuka kembali ruang bagi keterlibatan TNI dalam ranah sipil. Lonjakan pencarian tersebut mengikuti berkembangnya perdebatan publik mengenai potensi kembalinya praktik dwifungsi militer.

Media *online* kini telah berperan menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. Dengan kemudahan akses dan kecepatan penyampaian informasi, media online memiliki potensi besar untuk membentuk opini publik. Penelitian ini mengambil dua sudut pandang dari media online, yakni

Kompas.com dan Tempo.co dengan metode analisis *framing* dari Robert N. Entman. Kompas.com dan Tempo.co merupakan dua media arus utama yang memiliki karakter dan orientasi jurnalisme berbeda sehingga menarik untuk dikaji. Dilansir dari situs Kompas.com, Kompas.com merupakan salah satu pelopor media *online* di Indonesia yang mulai hadir di ranah internet sejak 14 September 1995 dengan nama awal Kompas *Online*. Kompas.com menyajikan berbagai informasi aktual seputar politik, ekonomi, teknologi, gaya hidup, dan isu-isu sosial, dengan pendekatan jurnalistik yang berfokus pada akurasi, kecepatan, dan kredibilitas. Sementara itu, Tempo.co juga merupakan salah satu pelopor transformasi portal berita digital yang dikelola oleh PT Tempo Inti Media Tbk, bagian dari Tempo Media Group, sebuah grup media terkemuka di Indonesia. Tempo.co dikenal karena gaya pemberitaan yang investigatif dan tajam, dengan menekankan pada jurnalisme data dan liputan mendalam. Media Portal ini menyuguhkan berita nasional mencakup berbagai topik seperti politik, bisnis, olahraga, hiburan, dan teknologi, serta dikenal dengan penyajian yang berani mengangkat isu-isu sensitif, termasuk korupsi, HAM, dan pelanggaran kekuasaan.

Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara berita tentang isu Dwifungsi Militer pada RUU TNI disampaikan dan diterima oleh publik. Kedua media ini dipilih karena merupakan sumber informasi yang banyak dibaca dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam menyajikan isu-isu nasional. Dilansir dari *website* Survei *GoodStats* tahun 2024, menunjukkan bahwa Kompas.com dan Tempo.co merupakan situs media *online* yang termasuk

dalam jajaran sepuluh media *online* terpopuler di Indonesia yang paling sering digunakan orang Indonesia untuk mendapatkan informasi setiap minggu. Berdasarkan data yang dilansir dari Databoks menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025, Kompas.com dan Tempo.co menempati posisi sebagai media online yang termasuk banyak dibaca oleh warga Indonesia. Tingginya tingkat keterbacaan ini menunjukkan bahwa kedua media ini memainkan peran penting dalam konsumsi berita daring dan memiliki potensi untuk mempengaruhi opini publik terkait isu-isu nasional. Pertimbangan lain dalam memilih Kompas.com dan Tempo.co adalah karena keduanya menyediakan arsip berita yang mudah diakses dan cukup lengkap. Hal ini memudahkan peneliti dalam mengumpulkan, menelusuri, serta menganalisis konten pemberitaan dalam rentang waktu tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.



Gambar 2. 10 Portal Berita Online yang Paling Sering Digunakan Publik Indonesia 2024

(Sumber: GoodStats)

Pembingkaiian berita (*framing*) menjadi kunci dalam memahami bagaimana informasi disajikan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi

masyarakat. Pembingkaiian tidak hanya mencakup pemilihan kata dan gambar, tetapi juga konteks yang diberikan, sudut pandang yang diambil, dan narasi yang dibangun. Analisis *framing* adalah metode untuk memahami cara media membingkai dan menyajikan realitas kepada publik. Melalui *framing*, media dapat menekankan atau menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Dengan kata lain, satu kejadian yang sama bisa ditampilkan dengan makna yang berbeda karena setiap media menggunakan bingkai atau sudut pandang yang tidak sama (Muzakkir, 2018).

Media memiliki kemampuan untuk menyoroti aspek tertentu dari sebuah peristiwa dan mengesampingkan aspek lainnya yang pada akhirnya dapat membentuk persepsi, sikap, bahkan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, *framing* media berperan sebagai alat yang sangat berpengaruh dalam membentuk narasi sosial dan politik, terutama di era modern yang ditandai dengan akses informasi yang cepat dan luas (Wulandari & Harianto, 2025). *Framing* menganalisis bagaimana media mengembangkan konstruksi tertentu akan realitas tersebut (Wicitra et al., 2023). Dalam hal ini, analisis pembingkaiian berita RUU TNI di kedua media tersebut menjadi penting untuk mengidentifikasi narasi yang dibangun, terutama terkait kembalinya wacana dwifungsi militer. Pembingkaiian yang berbeda dapat memengaruhi bagaimana publik memahami kemungkinan perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan.

Sebagai salah satu platform yang mampu menjangkau khalayak luas, situs berita media *online* memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang membaca berita atau informasi tersebut (Insani &

Zamzamy, 2023). Setelah mengakses berita, umumnya masyarakat akan membangun opini publik berdasarkan informasi dan pesan yang diterima. Menurut Eriyanto (2002), media massa pada dasarnya berfungsi sebagai ruang diskusi publik mengenai suatu isu yang melibatkan tiga elemen utama: jurnalis, narasumber, dan audiens.

Salah satu contoh dapat dilihat dari pilihan judul berita berikut “Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Perluasan Peran Militer dalam Revisi UU TNI Bentuk Dwifungsi” yang dipublikasikan oleh Tempo.co pada tanggal 14 Maret 2025. Sementara itu, Kompas.com pada tanggal 17 Maret 2025 mempublikasikan berita berjudul “Mensesneg: RUU TNI Jangan Dimaknai Bangkitnya Dwifungsi ABRI”. Kedua berita dengan judul tersebut mengandung unsur pro dan kontra pada pembacanya sehingga mengandung potensi konflik wacana yang bisa memengaruhi persepsi pembaca. Analisis *framing* diperlukan untuk melihat bagaimana media menyusun dan menampilkan sebuah isu atau peristiwa. Hal ini penting mengingat setiap media memiliki ideologi serta tujuan pemberitaan yang berbeda-beda. Fenomena pemberitaan terkait Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) mencerminkan bagaimana media massa memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang dan opini publik tentang masalah sosial dan politik. Dalam konteks ini, cara media mengemas isu melalui proses *framing* dapat memengaruhi cara masyarakat memahami, menilai, bahkan merespons suatu kebijakan publik. Media kadang memperlihatkan bagaimana cara pandangnya terhadap suatu isu

dalam memberitakan peristiwa, hal ini dapat dilihat dari cara penulisan masing-masing media (Rahmawati et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan bagaimana *framing* media dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu publik. Penelitian oleh Hafidli (2023) tentang *framing* kasus Kanjuruhan di Detikcom dan BBC News menunjukkan adanya perbedaan narasi antara media lokal dan internasional. Penelitian Wulandari (2025) juga menunjukkan bagaimana media berbeda membingkai kepemimpinan politik berdasarkan sudut pandang editorial masing-masing. Sementara itu, penelitian Rahmawati (2025) menyoroti *framing* dalam isu *All Eyes on Papua* oleh Kompas.com dan Tempo.co yang ternyata memiliki perbedaan signifikan dalam menyoroti aspek kemanusiaan versus kritik terhadap pemerintah. Meski banyak kajian tentang *framing* isu politik, masih sedikit penelitian yang secara spesifik membahas pembingkai media terhadap isu militer atau kebijakan pertahanan seperti RUU TNI, khususnya dalam konteks media online arus utama Indonesia.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Dengan memakai pendekatan analisis *framing* dari Robert N. Entman, studi ini berfokus pada cara Kompas.com dan Tempo.co membingkai isu kontradiktif RUU TNI terutama pada isu kembalinya dwifungsi militer. Analisis dilakukan melalui empat elemen utama seperti pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Tujuannya bukan hanya untuk melihat perbedaan sudut pandang antar media, tetapi juga untuk memahami bagaimana konstruksi realitas sosial dibentuk dan bagaimana media

berperan sebagai bagian dari proses konstruksi persepsi publik atas isu kembalinya dwifungsi militer yang berdampak luas bagi kehidupan demokrasi dan masyarakat sipil.

Dengan demikian, analisis *framing* menjadi penting untuk menelaah bagaimana media membentuk dan merepresentasikan suatu isu atau fenomena. Setiap media memiliki ideologi serta visi-misi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi proses produksi pemberitaannya. Kondisi ini turut membentuk cara media menarasikan isu-isu politik. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana portal berita online mengonstruksi isu dwifungsi militer dalam pembahasan RUU TNI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian yaitu “bagaimana pembingkai berita isu Dwifungsi Militer pada RUU TNI periode 14 Maret 2025 hingga 21 Maret 2025 di media *online* Kompas.com dan Tempo.co?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pembingkai berita isu Dwifungsi Militer pada RUU TNI periode 14 Maret 2025 hingga 21 Maret 2025 di media *online* Kompas.com dan Tempo.co.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian analisis *framing* media massa. Dengan menggunakan teori analisis *framing*, penelitian ini memperkuat penerapan teori dalam konteks isu militer dan kebijakan publik di media online Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji konstruksi realitas media terhadap isu-isu politik dan pertahanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi khalayak dalam menyajikan informasi yang lebih objektif dan kritis dalam memberitakan isu-isu sensitif dan kontroversial seperti isu kembalinya dwifungsi militer pada RUU TNI. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi media dalam melakukan pembedaan yang tidak hanya berdasarkan pada kepentingan redaksi, tetapi juga dalam mengutamakan prinsip kesetaraan dan keadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti konstruksi realitas media dalam pemberitaan isu politik dan pertahanan yang serupa.